



Pengaruh Elemen *Fraud Diamond* Terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Annisa Nabila Putri^{1*}, Rindu Rika Gamayuni²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: 29annisanabila@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine how the four elements of the Fraud Diamond theory—pressure, opportunity, rationalization, and capability—affect corruption in Indonesian local governments during the 2022–2023 fiscal years. Using multiple linear regression analysis and secondary data from official reports, this research analyzes 105 local governments. The results show that only the opportunity element significantly affects corruption. This implies that less transparent budget management may create greater chances for corrupt practices. The study highlights the importance of strengthening internal control and transparency to mitigate corruption.*

Keywords: *Capability, Corruption, Fraud Diamond, Opportunity, Pressure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana empat elemen dalam teori Fraud Diamond—tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas—mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia selama tahun anggaran 2022–2023. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan data sekunder dari laporan resmi, penelitian ini menganalisis 105 pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya elemen kesempatan yang berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang kurang transparan menciptakan peluang lebih besar bagi praktik korupsi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan transparansi untuk menekan korupsi.

Kata kunci: Kapabilitas, Kesempatan, Korupsi, Tekanan, Teori Fraud Diamond

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan isu serius yang merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan. Di tingkat pemerintah daerah, praktik ini sering terjadi melalui penyalahgunaan wewenang dan sumber daya untuk kepentingan pribadi. Data KPK mencatat 1.298 terdakwa korupsi pada tahun 2020 dengan kerugian negara sebesar Rp56,7 triliun, mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Faktor pemicu korupsi meliputi biaya politik tinggi, regulasi yang lemah, dan budaya korupsi yang mengakar. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu mengungkap faktor-faktor penyebabnya. Fraud Diamond Theory menawarkan empat elemen utama—tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas—yang saling berkaitan dalam memicu tindakan fraud. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keempat elemen tersebut terhadap korupsi di pemerintah daerah serta menilai relevansi teori Fraud Diamond dalam konteks sektor publik di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik sumber daya dan agen sebagai pengelola, yang rentan terhadap konflik kepentingan akibat asimetri

informasi (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal karena perbedaan tujuan, yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang (Putri, 2017; Mulya et al., 2019). Dalam sektor publik, masalah keagenan tercermin dalam relasi antara pemilih, pejabat publik, dan eksekutif, yang berisiko menimbulkan moral hazard (Lane, 2000). Korupsi dalam hal ini menjadi bentuk nyata penyimpangan agen terhadap mandat publik. Oleh karena itu, teori agensi relevan digunakan bersama teori Fraud Diamond untuk menjelaskan dan mencegah praktik korupsi di pemerintahan daerah.

Fraud Taxonomy

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengelompokkan fraud ke dalam tiga kategori utama yang dikenal sebagai fraud tree: penyimpangan aset, pernyataan menipu, dan korupsi (Priantara, 2013). Klasifikasi ini diperkenalkan melalui Report to the Nations (2008) untuk membantu mengidentifikasi jenis-jenis penipuan di lingkungan kerja. Penyimpangan aset mencakup pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, baik kas maupun non-kas (Didi & Kusuma, 2018). Pernyataan menipu meliputi manipulasi laporan keuangan atau penyajian informasi non-keuangan yang menyesatkan. Korupsi, sebagai kategori ketiga, mencakup penyalahgunaan wewenang seperti penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Di sektor publik, terutama pada pemerintah daerah, korupsi merupakan bentuk fraud yang paling dominan terjadi.

Korupsi

Korupsi merupakan bentuk fraud yang melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi (Tuanakotta, 2010). Di Indonesia, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Menurut ACFE, bentuk korupsi mencakup penyuapan, gratifikasi ilegal, benturan kepentingan, dan pemerasan. Teori agensi menjelaskan bahwa korupsi terjadi akibat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dipicu oleh asimetri informasi (Masrizal, 2010). Di tingkat pemerintah daerah, praktik ini semakin marak, terutama karena tingginya biaya politik yang mendorong pejabat mencari dana dari sponsor. Modus korupsi meliputi intervensi dalam APBD, pengelolaan penerimaan, serta pengadaan barang dan jasa yang rawan penyimpangan. Meskipun berbagai upaya seperti pembentukan KPK dan pakta integritas telah dilakukan, pemberantasan korupsi belum optimal. Lemahnya transparansi dan inkonsistensi kepala daerah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem politik dan penguatan pengawasan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Fraud Diamond

Korupsi di tingkat pemerintah daerah menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan kepercayaan publik. Untuk memahami fenomena ini, Fraud Diamond Theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menawarkan pendekatan komprehensif dengan empat elemen: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Teori ini menyempurnakan Fraud Triangle yang hanya mencakup tiga elemen pertama (Cressey, 1953). Keempat elemen dalam Fraud Diamond saling berinteraksi, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Tekanan dapat bersumber dari faktor politik atau ekonomi, kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan, rasionalisasi membenarkan tindakan tidak etis, dan kapabilitas memungkinkan pelaku melaksanakan korupsi tanpa terdeteksi. Pendekatan ini relevan dalam menganalisis berbagai bentuk korupsi di pemerintah daerah, seperti suap dan penyalahgunaan anggaran. Dengan kerangka ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor pemicu korupsi secara menyeluruh serta menekankan pentingnya pengawasan dan sistem pengendalian yang kuat (Sukmadilaga et al., 2022; Fuadi & Maburur, 2021)

Elemen Tekanan

Tekanan merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama saat individu menghadapi kesulitan yang tidak dapat diungkapkan karena konsekuensi hukum atau sosial (Cressey, 1950). Di lingkungan pemerintah daerah, tekanan sering muncul dari kebutuhan finansial, stres kerja, dan lemahnya pengawasan (Wolfe & Hermanson, 2004; Sukmadilaga et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kecurangan, khususnya dalam pelaporan keuangan (Mansor & Abdullahi, 2015). Tekanan ini diproksi melalui Rasio Pengelolaan Anggaran, di mana rasio rendah mencerminkan potensi penyimpangan akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Achmad et al., 2022; Suryandari & Valentin, 2021). Sebaliknya, rasio tinggi menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dan rendahnya risiko korupsi.

Elemen Kesempatan

Kesempatan merupakan elemen kunci dalam Fraud Diamond Theory, yang mengacu pada situasi yang memungkinkan individu melakukan tindakan korupsi karena lemahnya pengawasan dan kontrol internal (Cressey, 1950; Romney & Steinbart, 2016). Dalam konteks pemerintah daerah, kesempatan sering muncul pada proses belanja APBD, khususnya belanja modal. Beberapa indikator yang merepresentasikan kesempatan antara lain: kompleksitas wilayah, ukuran organisasi, besar kecilnya belanja modal, dan temuan

kelemahan pengendalian intern sebelumnya (Maria et al., 2018; Martani & Zaelani, 2011; Fatimah et al., 2014). Belanja modal yang tinggi tanpa pengawasan memadai memberi celah bagi kolusi antara pejabat dan pengusaha, termasuk manipulasi tender dan mark-up anggaran (Maria et al., 2019).

Elemen Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan proses pembenaran atas tindakan korupsi oleh pelaku, yang sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau praktik umum (Vousinas, 2019; Murtanto & Sandra, 2019). Lingkungan yang permisif dan lemahnya sanksi memperkuat kecenderungan ini. Dalam sektor publik, rasionalisasi berhubungan erat dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP yang lemah memberi ruang bagi pelaku untuk membenarkan tindakan korupsi, sedangkan sistem yang kuat mampu menekan kecenderungan tersebut (Umar & Nasution, 2018). Tingkat efektivitas SPIP diukur melalui skala maturitas 1 hingga 6, di mana level 3 merupakan target standar nasional untuk pengendalian internal.

Elemen Kapabilitas

Kapabilitas menggambarkan kemampuan individu untuk mengabaikan kontrol internal dan menjalankan tindakan korupsi secara sistematis (Rusmana & Tanjung, 2019). Pelaku korupsi umumnya memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem dan mampu menyembunyikan tindakannya dalam jangka panjang (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam sektor publik, kapabilitas diproksi melalui tingkat kematangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang mencakup kapasitas, kewenangan, dan kompetensi auditor internal. Efektivitas audit internal berperan penting dalam pencegahan korupsi (Fuadi & Mabrur, 2021). APIP diklasifikasikan dalam lima level kapabilitas, dengan Level 3 sebagai standar minimal untuk menjalankan fungsi assurance dan advisory secara optimal (Sofiyani, 2018). Kapabilitas yang rendah menunjukkan lemahnya pengawasan, sementara kapabilitas tinggi berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Elemen Tekanan Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Tekanan muncul ketika individu atau organisasi menghadapi masalah yang tidak dapat dibagikan karena risiko hukum atau sosial, seperti kesulitan keuangan (Cressey, 1950). Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, tekanan bisa berasal dari tuntutan kinerja atau kebutuhan finansial mendesak. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan kontrol yang baik cenderung tidak melakukan korupsi meskipun berada di bawah tekanan (Apriliana & Agustina, 2017). Pengelolaan tekanan yang efektif dapat mengurangi

kemungkinan korupsi, mengingat hubungan negatif antara rasio pengelolaan anggaran yang tinggi dan korupsi. Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H1: Tekanan berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

Pengaruh Elemen Kesempatan Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Kesempatan mengacu pada kondisi yang memungkinkan tindakan tidak jujur demi keuntungan pribadi (Romney & Steinbart, 2016). Dalam pemerintahan daerah, kesempatan terjadinya korupsi sering muncul dalam belanja modal, yang melibatkan dana besar dan pengawasan lemah. Penelitian menunjukkan semakin besar alokasi belanja modal, semakin tinggi peluang terjadinya korupsi (Maria et al., 2019; Wicaksono & Prabowo, 2022). Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

Pengaruh Elemen Rasionalisasi Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Rasionalisasi adalah upaya membenarkan tindakan tidak etis seperti korupsi (Festinger, 1957). Dalam pemerintah daerah, rasionalisasi sering muncul akibat tekanan ekonomi atau ketidakpuasan terhadap imbalan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat meminimalisir rasionalisasi (Jannah et al., 2021; Wicaksono & Prabowo, 2022). Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

Pengaruh Elemen Kapabilitas Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Kapabilitas merujuk pada kemampuan individu dalam organisasi untuk melakukan kecurangan, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas memadai (Murtanto & Sandra, 2019). Dalam konteks pemerintah daerah, kapabilitas diukur melalui efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian menunjukkan semakin tinggi kapabilitas APIP, semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi (Fuadi & Maburur, 2021). Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H4: Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dokumen tingkat kapabilitas APIP serta tingkat maturitas SPIP dari pemerintah daerah yang mengalami kerugian keuangan negara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda, yang didukung oleh pengujian statistik melalui uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22.

Korupsi

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah korupsi, dengan pengukuran yang digunakan adalah jumlah kerugian keuangan negara yang bersumber dari APBD berdasarkan data IHPS pada web BPK. Korupsi= (Total Kerugian Keuangan Negara)/(Total Anggaran).

Fraud Diamond

Penelitian ini menggunakan teori fraud diamond sebagai landasan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kecurangan. Adapun penggunaan proksi dan pengukurannya dalam variabel independen pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Proksi	Pengukuran	Dasar Pengukuran
Tekanan	Rasio Pengelolaan Anggaran	$\text{Rasio Pengelolaan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}}$	Sukmadilaga (2022)
Kesempatan	Rasio Belanja Modal	$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$	Mahmudi (2010)
Rasionalisasi	Nilai Maturitas SPIP	Level 0 diberikan nilai 6 Level 1 diberikan nilai 5 Level 2 diberikan nilai 4 Level 3 diberikan nilai 3 Level 4 diberikan nilai 2 Level 5 diberikan nilai 1	Pane (2018)
Kapabilitas	Nilai Kapabilitas APIP	Level 1 diberikan nilai 1 Level 2 diberikan nilai 2 Level 3 diberikan nilai 3 Level 4 diberikan nilai 4 Level 5 diberikan nilai 5	Fuadi dan Maburr (2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dari penelitian ini terdiri dari 514 pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2022–2023, yang meliputi 416 kabupaten dan 98 kota dari 38 provinsi (Mendagri, 2022). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

probability sampling dengan teknik cluster sampling. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, jumlah sampel minimal dari populasi 514 pemerintah daerah adalah 84 (Kothari, 2004: 179). Namun, peneliti memilih memperbesar jumlah sampel menjadi 105 untuk meningkatkan representativitas, mengurangi margin of error, serta mengantisipasi missing data dan outlier. Keputusan ini juga didukung oleh ketersediaan sumber daya dan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih stabil dan andal dalam mengkaji elemen Fraud Diamond terhadap korupsi daerah.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tekanan (Anggaran)	170	.27	1.92	.9265	.14568
Kesempatan (Belanja)	170	.01	1.05	.2070	.14538
Rasionalisasi (SPIP)	170	1.00	6.00	3.5412	1.79778
Kapabilitas (APIP)	170	1.00	5.00	3.2706	1.42163
Korupsi	170	.01	10.05	1.1326	1.58186
Valid N (listwise)	170				

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Dari 210 data yang terkumpul, sebanyak 40 data dikeluarkan sebagai outlier, sehingga analisis dilakukan terhadap 170 sampel. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa tekanan anggaran dan kesempatan belanja tergolong rendah dengan variasi kecil (rata-rata masing-masing 0.9265 dan 0.2070). Sebaliknya, rasionalisasi SPIP dan kapabilitas APIP menunjukkan variasi yang lebih besar antar daerah (standar deviasi masing-masing 1.79778 dan 1.42163). Variabel korupsi memiliki rata-rata rendah (1.1326), namun standar deviasi tinggi (1.58186), menandakan adanya perbedaan tingkat korupsi antar daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal, khususnya terkait rasionalisasi dan kapabilitas, bervariasi di tiap wilayah.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	170
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengujian normalitas yang dilakukan pada 170 sampel kabupaten/kota di Indonesia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai ambang batas yang ditentukan, yakni $> 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwasanya model regresi yang digunakan telah terdistribusi dengan normal dan tidak memiliki masalah normalitas.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tekanan (Anggaran)	.975	1.026
	Kesempatan (Belanja)	.960	1.041
	Rasionalisasi (SPIP)	.955	1.047
	Kapabilitas (APIP)	.975	1.026

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Nilai Tolerance untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: tekanan anggaran = 0.975, kesempatan belanja = 0.960, rasionalisasi (SPIP) = 0.955, dan kapabilitas (APIP) = 0.975. Selanjutnya, nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah tekanan anggaran = 1.026, kesempatan belanja = 1.041, rasionalisasi (SPIP) = 1.047, dan kapabilitas (APIP) = 1.026.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	.209	.138	1.516	.131
	Tekanan (Anggaran)	.111	.139	.062	.424
	Kesempatan (Belanja)	.034	.140	.019	.810
	Rasionalisasi (SPIP)	-.015	.011	-.107	.174
	Kapabilitas (APIP)	.024	.014	.131	.094

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap ABS_RES, sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam

model. Tekanan anggaran ($p = 0.424$), kesempatan belanja ($p = 0.810$), rasionalisasi/SPIP ($p = 0.174$), dan kapabilitas APIP ($p = 0.094$) semuanya memiliki p-value di atas 0.05. Dengan demikian, seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap residual absolut, dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.369 ^a	.173	.150	.54175	1.796

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.796, berada dalam rentang aman (1.5–2.5), sehingga tidak terdapat autokorelasi dan asumsi independensi residual terpenuhi. Nilai R sebesar 0.369 menunjukkan hubungan lemah antara variabel independen dan dependen. R Square sebesar 0.173 berarti model hanya mampu menjelaskan 17.3% variasi variabel dependen, sementara 82.7% dipengaruhi faktor lain. Adjusted R Square sebesar 0.150 memberikan gambaran prediktif yang lebih akurat setelah penyesuaian variabel. Standard Error of the Estimate (SEE) sebesar 0.54175 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model. Secara keseluruhan, meski bebas autokorelasi, model ini memiliki daya jelas yang terbatas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.538	.819		.657	.512
	Tekanan (Anggaran)	.373	.824	.034	.453	.651
	Kesempatan (Belanja)	2.657	.832	.244	3.191	.002
	Rasionalisasi (SPIP)	-.057	.067	-.065	-.846	.399
	Kapabilitas (APIP)	-.030	.085	-.027	-.360	.719

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Berikut persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini :

$$Y = 0.538 + 0.373X_1 + 2.657X_2 - 0.057X_3 - 0.030X_4 + e$$

Uji T

- Tekanan Anggaran (X_1) memiliki p-value 0.651 dan koefisien 0.373. Meskipun arah pengaruh positif, hasilnya tidak signifikan, sehingga hipotesis bahwa tekanan anggaran berpengaruh terhadap korupsi **ditolak**.
- Kesempatan Belanja (X_2) memiliki p-value 0.002 dan koefisien 2.657. Pengaruhnya signifikan dan positif terhadap korupsi, sehingga hipotesis bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi **diterima**.
- Rasionalisasi (SPIP) (X_3) memiliki p-value 0.399 dan koefisien -0.057. Tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap korupsi, sehingga hipotesis bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi **ditolak**.
- Kapabilitas (APIP) (X_4) memiliki p-value 0.719 dan koefisien -0.030. Pengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga hipotesis bahwa kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi **ditolak**.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
		Sum of		Mean		
Model		Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	30.683	4	7.671	3.227	.014 ^b
	Residual	392.203	165	2.377		
	Total	422.886	169			

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0.014 dan F-hitung 3.227, yang lebih besar dari F-tabel 2.42 pada tingkat signifikansi 0.05. Karena $3.227 > 2.42$ dan $0.014 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tekanan (Anggaran), Kesempatan (Belanja), Rasionalisasi (SPIP), dan Kapabilitas (APIP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

R Square atau Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.369 ^a	.173	.150	0.54175

Sumber : Data diolah SPSS 22 (2025)

Hasil Model Summary menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0.369 mencerminkan hubungan yang lemah antara variabel independen (tekanan anggaran, kesempatan belanja,

rasionalisasi SPIP, dan kapabilitas APIP) dengan tingkat korupsi. Nilai R Square sebesar 0.173 berarti model hanya mampu menjelaskan 17,3% variasi dalam tingkat korupsi, sementara sisanya 82,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.150 juga mengindikasikan bahwa kemampuan prediktif model tergolong rendah setelah disesuaikan dengan jumlah variabel. Nilai Standard Error of the Estimate (SEE) sebesar 0.54175 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model masih cukup tinggi. Temuan ini menyiratkan perlunya mempertimbangkan variabel lain seperti kebijakan daerah, efektivitas dan independensi pengawasan eksternal, transparansi anggaran, serta faktor sosial-politik dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat korupsi namun belum tercakup dalam model ini.

Pengaruh Tekanan terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah

Tekanan dalam organisasi muncul saat individu menghadapi situasi sulit yang tidak dapat diungkapkan, seperti ekspektasi kinerja tinggi atau kebutuhan finansial (Cressey, 1950; Sukmadilaga et al., 2022). Dalam konteks pemerintah daerah, tekanan diproksi melalui rasio pengelolaan anggaran. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa tanpa kesempatan dan kapabilitas, tekanan saja tidak cukup menyebabkan tindakan korupsi (Wolfe & Hermanson, 2004). Dengan demikian, hipotesis H1 ditolak.

Pengaruh Kesempatan terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah

Kesempatan merupakan elemen penting dalam teori Fraud Diamond, mencerminkan lemahnya pengawasan yang menciptakan peluang korupsi (Romney & Steinbart, 2016). Belanja modal pemerintah daerah yang besar tanpa kontrol memadai terbukti signifikan mendorong korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi, sejalan dengan penelitian sebelumnya (Maria et al., 2019; Wicaksono & Prabowo, 2022). Temuan ini mendukung hipotesis H2.

Pengaruh Rasionalisasi terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah

Rasionalisasi mengacu pada pembenaran pelaku terhadap tindakan korupsi. Dalam penelitian ini, rasionalisasi diproksi melalui tingkat efektivitas SPIP. Meskipun secara teori penting, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Ini menunjukkan bahwa pengendalian internal belum cukup efektif menekan rasionalisasi perilaku koruptif, sehingga hipotesis H3 ditolak.

Pengaruh Kapabilitas terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah

Kapabilitas menggambarkan kemampuan pelaku untuk melakukan korupsi secara sistematis. Diperoleh dari tingkat kapabilitas APIP, elemen ini tidak menunjukkan hubungan

signifikan dengan korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun APIP berperan penting dalam pengawasan, kelemahan dalam independensi dan sumber daya membuat pengaruhnya belum optimal (Fuadi & Maburur, 2021). Dengan demikian, hipotesis H4 juga ditolak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa dari keempat elemen dalam Fraud Diamond Theory yang diuji dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, hanya elemen kesempatan yang diproksikan melalui belanja modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Artinya, semakin besar alokasi belanja modal yang tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai, semakin tinggi pula potensi terjadinya korupsi. Sebaliknya, tekanan yang diukur melalui pengelolaan anggaran, rasionalisasi melalui efektivitas SPIP, serta kapabilitas melalui kualitas APIP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian korupsi melalui pengelolaan tekanan, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan kapabilitas pengawasan belum berjalan optimal atau belum cukup efektif dalam menekan perilaku koruptif di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu dua tahun, serta cakupan variabel yang masih terbatas pada elemen-elemen Fraud Diamond. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan hingga lima tahun guna menangkap tren jangka panjang dan mengkaji dampak kebijakan antikorupsi secara lebih akurat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan variabel lain seperti efektivitas sanksi hukum, transparansi keuangan, peran whistleblower, dan partisipasi publik. Penggunaan metode mixed-method juga disarankan agar analisis tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga mampu menangkap dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi praktik korupsi di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i4/1823>
- ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). (2016). *Report to the nations on occupational fraud and abuse*. ACFE.
- ACFE Indonesia. (2020). *Laporan fraud Indonesia 2020*. ACFE Indonesia.

- Achmad, T., Nugraha, P., & Fitri, A. (2022). Pengaruh tekanan anggaran terhadap perilaku korupsi di sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 87–102.
- Achmad, T., Rahman, A. F., & Mukti, A. D. (2022). Public sector financial management and corruption: An empirical study in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(3), 287–305.
- Achmad, T., Rustiarini, N. W., & Tarigan, J. (2022). The effect of budget ratios on corruption in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(1), 50–75. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2020-0176>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud examination* (4th ed.). Cengage Learning.
- Apriani, D. (2020). The effect of internal control and individual morality on fraud tendency in public sector organizations. *Journal of Accounting and Finance*, 15(1), 112–125.
- Apriani, R. (2020). Rasionalisasi dalam teori fraud triangle dan implikasinya terhadap korupsi di sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 45–60.
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The effect of fraud triangle on the tendency of accounting fraud in local government. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 524–529.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022–2023*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Penilaian kapabilitas APIP dan maturitas SPIP pemerintah daerah tahun 2022–2023*. Jakarta: BPKP RI.
- Corrado, G., & Rossetti, C. (2018). Corruption and public sector spending: A comparative study between Nigeria and Italy. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 215–230.
- Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Crowen, H. (2011). *Fraud pentagon model: Enhancing fraud detection frameworks*. Academic Press.
- Desviana, N., Yurniwati, & Septiani, T. (2020). Rationalization in fraud pentagon: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 377–394. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.011.02.10>
- Didi, K., & Kusuma, H. (2018). *Fraud and its prevention in accounting practices*. Jakarta: Pustaka Akademik.
- Dorminey, J. W., Fleming, A. S., Kranacher, M., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.

- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Fatimah, F., Rochmansjah, R., & Saputra, R. (2014). The role of internal control in preventing fraud in local governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 25–40.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Fitri, A. (2020). Internal control system and corruption prevention in local governments. *Journal of Government Auditing*, 8(1), 45–60.
- Fitri, Y. (2020). Sistem pengendalian internal sebagai instrumen dalam mencegah fraud di pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(2), 67–78.
- Fuadi, A., & Maburur, A. (2021). Fraud diamond theory: Understanding corruption in local government. *Journal of Governance and Integrity*, 3(2), 105–120.
- Fuadi, F., & Maburur, R. (2021). Analisis pengaruh kapabilitas audit internal terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. *Jurnal Pengawasan dan Akuntabilitas*, 9(1), 44–58.
- Fuadi, M., & Maburur, M. (2021). Pengaruh kapabilitas APIP terhadap pencegahan fraud di sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 55–68.
- Fuadi, T. A., & Maburur, M. (2021). The effectiveness of internal government auditors in preventing corruption in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 210–228.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Public sector governance and agency theory perspective*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T. (2022). The role of e-government and APIP capability in reducing corruption in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 88–105.
- Hastuti, R., & Wiratno, A. (2020). Transparency and accountability in reducing corruption risk: Evidence from local governments in Indonesia. *Journal of Government Financial Management*, 69(1), 18–32.
- Hidayat, R., & Susanti, R. (2021). Fraud prevention in local government: Role of internal control and organizational commitment. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 521–536.
- Isgiyarta, J., Setiawan, D., Pertiwi, P. R., & Arfan, M. (2020). Determinants of corruption in Indonesian local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 115–130. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.06>

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2023). *Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. Jakarta: KSAP.
- Kurnia, R., & Handayani, S. (2020). Fraud triangle analysis on financial statement fraud: A study on Indonesian local government. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 144–160.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Murtanto, M. (2021). Fraud triangle, internal audit, and good governance in preventing fraud. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 85–100.
- Ningrum, R. P., & Utami, W. (2020). Effect of budget pressure and organizational commitment on tendency of fraud with moral as moderation. *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 178–192. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i2.605>
- Nurhidayat, I., & Yaya, R. (2017). Evaluation of internal audit capability of Indonesian public sector: A comparative study. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 23–36.
- Prasetyo, E. A., & Sari, D. K. (2020). Whistleblowing and the effectiveness of fraud prevention in the Indonesian government sector. *Jurnal Pengawasan Keuangan Negara*, 8(1), 34–50.
- Pratama, A. B. (2020). Fraud prevention in the public sector: The role of internal control and ethical leadership. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 112–128.
- Pratomo, D., & Riyadi, R. (2018). Analysis of budgetary slack using the fraud triangle approach. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–18.
- Putra, R. D., & Pamungkas, I. D. (2020). Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 112–123.
- Putri, M. A., & Hermawan, R. (2021). Fraud pentagon analysis in detecting financial statement fraud: Empirical study in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 59–72. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i1.732>
- PwC Indonesia. (2020). *Fraud survey 2020: Fighting fraud in the new normal*. <https://www.pwc.com/id/en/publications/ia-fraud-survey-2020.html>
- Rahmawati, Y., & Ramadhani, D. (2021). Fraud prevention and detection in Indonesian local governments: A study using fraud triangle theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 44–58.
- Ramdani, Z., & Lestari, E. (2019). Fraud triangle, whistleblowing, and ethical culture in public sector fraud prevention. *Jurnal Etika dan Akuntabilitas Publik*, 5(1), 65–80.
- Ratmono, D., & Huda, N. (2021). Good governance, fraud prevention, and internal control in local governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 167–183.

- Rizky, A., & Rizal, M. (2022). Budget pressure and unethical behavior in public organizations: A fraud triangle perspective. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 88–104.
- Rustiarini, N. W., & Sugiarti, R. (2021). Fraud triangle and whistleblowing: The Indonesian public sector context. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 22–35.
- Ruzie, M., & Fitriah, F. (2021). Internal control and fraud prevention in local governments: A case study from Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1–14.
- Sari, M. E., & Fitriani, L. (2020). The influence of internal auditor capability and government internal control system on fraud prevention in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 102–120.
- Setiawan, D., & Puspitasari, Y. (2020). Exploring fraud diamond factors in corruption cases of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 123–138.
- Supriyadi, M., & Yuniawan, A. (2022). Fraud pentagon analysis on corruption tendencies in Indonesian regional governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 23–36.
- Syahputra, H., & Mulyadi, M. (2021). Organizational culture and fraud in the public sector: The mediating role of internal control. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 144–160.
- Widyaningrum, A. K., & Rizki, F. N. (2020). APIP capability and SPIP maturity on local government fraud prevention. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 66–80.
- Yayuk, S., & Lestari, P. (2021). Fraud triangle perspective in analyzing corruption in Indonesian local governments. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 34–47.
- Yusof, N. Z. M., & Jainudin, N. A. (2014). Assessing fraud risk factors: Evidence from the Malaysian banking sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 515–521. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.123>